



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZULKIFLI
2. Jabatan : KEPALA BIRO
3. NHK : 788473

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 5.150.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m²/70 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 860.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m²/36 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 63 m²/102 m² di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 1.350.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 261 m²/400 m² di KAB / KOTA KOTA BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 1.850.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 97 m²/60 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 188 m²/120 m² di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 81.900.000

1. MOTOR, HONDA KARISMA 125 Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 160 CC Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 29.900.000
3. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA XV A/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 72.706.600

D. SURAT BERTAHAPAN

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 2.544.861.109



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	7.849.467.709
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.849.467.709

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.